



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BANDA ACEH MENURUT PENGELUARAN

(Gross Regional Domestic Product of Banda Aceh Municipality by Expenditure)

2012-2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Kota Banda Aceh Menurut Pengeluaran
*(Gross Regional Domestic Bruto Of Banda Aceh Municipality by
Expenditure)*

2012-2016

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BANDA ACEH
MENURUT PENGELUARAN
2012-2016**

*GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT OF BANDA ACEH MUNICIPALITY
BY EXPENDITURE 2012-2016*

ISSN <i>ISSN</i>	: 2541-2795
Nomor Publikasi <i>Publication Number</i>	: 11715.1702
Katalog BPS <i>Catalog</i>	: 9302003.1171
Jumlah Halaman <i>Number of Pages</i>	: 42 + vii
Naskah <i>Script</i>	: BPS Kota Banda Aceh
Desain dan Gambar Kulit <i>Design and Cover</i>	: BPS Kota Banda Aceh
Diterbitkan Oleh <i>Published By</i>	: BPS Kota Banda Aceh

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
May quoted with mentioning the source

KATA PENGANTAR

PREFACE

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh semakin penting dan dirasakan manfaatnya sebagai salah satu bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan. Selain pemerintah, pihak berkepentingan dengan data PDRB juga mencakup masyarakat akademis, peneliti serta pihak swasta. Untuk itu, ketersediaan data setiap tahun menjadi perhatian serius bagi BPS Kota Banda Aceh.

Angka PDRB sebagaimana biasa disajikan menurut perhitungan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2010. Disusun pula berbagai tabel berisi angka persentase maupun indeks tertentu yang lazim digunakan dalam penyajian angka PDRB.

Data tahun 2016 merupakan angka sangat sementara karena beberapa data dasar yang digunakan masih dalam bentuk angka sementara, namun data tahun sebelumnya merupakan angka yang sudah direvisi. Angka sementara ini akan direvisi pada terbitan tahun mendatang.

Konsep/definisi dari materi publikasi yang digunakan turut kami cantumkan sebagai kemudahan bagi pemakai data dalam memahami dan memanfaatkan publikasi ini atas angka-angka yang tersaji.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi konsumen data statistik. Atas bantuan semua pihak yang membantu terbitnya publikasi ini kami ucapkan terima kasih. Segala kritik dan saran demi penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang menjadi harapan kami.

Data Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Banda Aceh increasingly important and perceived benefits as one of the evaluation and development planning. Besides the government, the GDP data is also concerned with the community include academics, researchers and the private sector. To that end, the availability of data every year a serious concern for BPS Banda Aceh.

GDP figures are presented according to the calculation as usual at current prices and at constant prices of 2010. Compiled too many tables contain certain percentages or indices that are commonly used in the presentation of GDP figures.

The data in 2016 are very preliminary numbers because some of the data base used is in the form of preliminary figures, but the previous year's data is a number that has been revised. The preliminary figures will be revised in the coming year issue.

Concepts/definitions of the material used publications we also include as a convenience for users to understand and utilize the data in this publication on the figures presented.

Hopefully this publication for consumers statistical data. The help of all those who helped the publication of this we thank you. All the criticism and suggestions for improving this publication in the future to our expectations.

Banda Aceh, September 2017
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh,
Chief of BPS-Statistics of Banda Aceh Municipality


Ir. Hamdani, MSM
NIP. 196312311991031024

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar Kepala BPS Kota Banda Aceh	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
 Bab I Pendahuluan	1
<i>Preliminary</i>	
1.1 Latar Belakang	1
<i>Background</i>	
1.2 Pengertian PDRB	2
<i>Definition of the GRDP</i>	
1.3 Manfaat PDRB	2
<i>Benefits of the GDP</i>	
1.4 Perubahan Tahun Dasar PDRB	3
<i>Base Year Changing of GRDP</i>	
 Bab II Metodologi	7
<i>Methodology</i>	
2.1 Konsumsi Rumah Tangga	7
<i>Household Final Consumption</i>	
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	11
<i>Final Non-Profit Institutions Serving Household</i>	
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	15
<i>Government Final Consumption Expenditure</i>	
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
<i>Gross Fixed Capital Formation (GFCF)</i>	
2.5 Perubahan Inventori	25
<i>Changes of Inventories</i>	
2.6 Ekspor Impor	30
<i>Export Import</i>	
 Bab III Tinjauan Ekonomi	32
<i>Economic Review</i>	
 Lampiran	38

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	3 Besar Kabupaten/Kota Penyumbang Terbesar PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Aceh (trilyun rupiah), 2012-2016 <i>Big 3 Regency/City Contributor to GRDP in Current Price in Aceh Province (billion rupiahs), 2012-2016</i>	32
Tabel 3.2	Distribusi PDRB Kota Banda Aceh ADHB Menurut Pengeluaran, 2012-2016 <i>Component Share of Banda Aceh GRDP by Expenditure in Current Price, 2012-2016</i>	33
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Komponen dan Kontribusi atas Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Banda Menurut Pengeluaran, 2012-2016 <i>Component's Growth and Their Contribution to GRDP Growth of Banda Aceh in Constant Price, 2012-2016</i>	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 PDRB ADHK Kota Banda Aceh dan Laju Pertumbuhannya, 2012-2016 <i>GRDP of Banda Aceh in Constant Price and It Growth, 2012-2016</i>	35
Gambar 3.2 PDRB Perkapita Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan/ADHK (juta rupiah), 2012-2016 <i>GRDP Percapita of Banda Aceh at Current and Constant Price (million rupiahs), 2012-2016</i>	37

<http://bandaacehkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel L.1 PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran, 2012-2016 <i>GRDP of Banda Aceh at Current Market Prices By Expenditure (million), 2012-2016</i>	39
Tabel L.2 PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran, 2012-2016 <i>GRDP of Banda Aceh at Constant Market Prices By Expenditure (million), 2012-2016</i>	40
Tabel L.3 Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran, 2012-2016 <i>Distribution of Banda Aceh's GRDP at Current Market Prices By Expenditure (million), 2012-2016</i>	41
Tabel L.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran, 2012-2016 <i>Growth of Banda Aceh's GRDP at Constant Market Prices By Expenditure (million), 2012-2016</i>	42

BAB 1 PENDAHULUAN

Chapter Preliminary

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil di masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasilnya. Berbagai data statistik bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan masa lalu dan masa kini, serta sasaran yang akan dicapai pada masa mendatang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diupayakan sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan bagaimana perkembangannya, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional/regional khususnya

1.1 Background

Economic development planning, requiring a variety of statistical data as rationale in determining the policy strategy, the goals can be achieved pembangunan appropriately. Strategies and policies that have been taken during the past need to be monitored and evaluated the results of the outcome. Various statistical data and quantitative needed to give a snapshot of the state in the past and the present, as well as target audiences to be reached in the future.

In effect, economic development is a series of business and policies that aim to improve people's lives, expanding employment, income distribution pemerata-kan community and improving regional and economic relations through economic activity shifts from the primary sector to the secondary and tertiary sectors. In other words the direction of economic development is to keep people's incomes rise, accompanied by the equitable distribution of income sought as possible.

To determine the level of people's income and development, to be presented statistics National Income/Regional periodically, for use as a national or regional development planning, especially in the economic field. Figures on national income / regional can be used as well as an evaluation of the results of economic development that have been implemented by the

khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

1.2 Pengertian PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.3 Manfaat PDRB

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

various parties, both the central government / local, and private.

1.2 Definition of the GRDP

Gross Regional Domestic Product (GRDP) is a gross value added of all goods and services that are created or produced in the domestic territory of a region that arise from economic activity in a given period regardless of whether the factors of production are owned by residents or non-resident. Preparation of the GDP can be done through three (3) approach to the production approach, expenditure and income are presented based on current prices and constant prices (real).

GDP at current prices, known as the GDP nominal prepared based on the prices prevailing at the accounting period, and aims to look at the structure of the economy.

While the GDP at constant prices (real) have been prepared under the base year and aims to measure economic growth.

1.3 Benefits of the GDP

Data national income is one of the economic indicators that can indicate the condition of the national economy every year. Benefits to be derived from this data include:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi dalam suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
 2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
 3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar merupakan basis perekonomian suatu wilayah.
 4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
 5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.
1. *the GDP at current prices (nominal) indicates the ability of the economic resources of the region. Great value of GDP shows the ability of large economic resources, and vice versa.*
 2. *GRDP constant prices (real) can be used to indicate the rate of overall economic growth or each category from year to year.*
 3. *Distribution of the GDP at current prices by the undertaking shows the structure of the economy or the role of each economic category in a region. Economic categories that have a major role in the economic base of a region.*
 4. *GDP per capita at current prices shows the value of GDP and GNI per one resident.*
 5. *GDP per capita at constant prices is useful to know the real economic growth per capita of the population of a country.*

1.4 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam

1.4 Base Year Changing of GRDP

Over the last ten years, many changes in the global order and local influence on the national economy. The global financial crisis that occurred in 2008, the implementation of free trade between the China-ASEAN (CAFTA), changes in the recording system of international trade and the broadening of capital markets services are examples of changes that need to be adapted in the national statistics recording mechanism.

mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi, dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan.

One form of adaptation of national statistical recording is to change the base year's GDP of Indonesia from 2000 to 2010. Changes in the base year's GDP is in line with the implementation of the recommendation of the United Nations (UN) as stipulated in the 2008 System of National Accounts (SNA 2008) through the preparation framework Supply and Use Tables (SUT).

GDP base year change is done simultaneously with the calculation of Gross Regional Domestic Product (GDP) of the province to maintain the consistency of the results tally.

SNA 2008 is an international standard recommendations on how to measure economic activity in accordance with the conventional calculation is based on the principles of economics. Recommendation is expressed in a set of concepts, definitions, classifications and rules balance the internationally agreed measure certain items such as the GDP.

SNA is designed to provide information about the activities of economic actors in terms of production, consumption, and accumulation of wealth and can be used for analysis, decision-making and policy-making.

Dengan menggunakan kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami. Adapun manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain:

- 1 Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- 2 Meningkatkan kualitas data PDRB;
- 3 Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

1. Meningkatkan nominal PDRB, yang pada selanjutnya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
2. Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
3. Akan menyebabkan perubahan input data

Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- 1 Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- 2 Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;

By using the SNA framework, economic phenomena can be better explained and understood.. The benefits of the GDP base year change, among others:

- 1 Inform the latest regional economy such as the shift structure and economic growth;*
- 2 Improving the quality of data the GDP;*
- 3 Make GRDP data internationally comparable.*

A shift in base year prices will have some impact, among others:

- 1. Increasing the GDP nominal, which in turn, will impact on the shift in the income of an area of lower income, into the medium, or high and shifting economic structure;*
- 2. Change the amount of macro indicators such as the tax ratio, debt ratio, the ratio of investment and savings, current account value, structure and economic growth;*
- 3. Will cause changes to the data input*

In 2010 selected as the new base year 2000 replaces the base year for the following reasons:

- 1 The Indonesian economy in 2010 are relatively stable;*
- 2 There has been a change in the economic structure for 10 (ten) years especially in the field of information and technology and transportation that affect the distribution patterns and the emergence of new products;*

- 3 Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun1;
 - 4 Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
 - 5 Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
 - 6 Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.
3. *United Nations Recommendations on the turn base year conducted every five (5) or 10 (ten) years;*
 - 4 *The existence of renewal concepts, definitions, classifications, coverage, data sources and methodology as recommended in the SNA 2008;*
 - 5 *The availability of new data sources for improvement of the GDP such as the Population Census of 2010 (SP 2010) and the producer price index (Producers Price Index / PPI);*
 - 6 *Availability of a SUT framework that describes the flow of production and consumption balance (goods and services) and the generation of revenues from the production activity.*

BAB 2 METODOLOGI *Chapter 2 Methodology*

2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Selain sebagai produsen (tenaga kerja dan penyedia faktor produksi lain), rumah tangga juga berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Yang dimaksud sebagai rumah tangga adalah individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal.

Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut **COICOP** (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh **UN** (*United Nations*), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar

2.1 Household Final Consumption

The household sector has a considerable role in the economy. Aside from being a producer (labor and other production factors providers), households also acts as final consumer goods and services.

Household final consumption expenditure (PKRT) is spending on goods and services by households for consumption purposes. Referred to as the household is an individual or group of individuals who live together in a residence building.

They collect revenue, may have assets and liabilities, as well as the consumption of goods and services together, the main groups of food and housing.

PKRT include all expenditure on goods and services by a resident of an area, whether committed inside or outside the domestic territory of a region. The types of goods and services consumed are classified according to COICOP (Classifications of Individual Consumption by Purpose), as recommended by UN (United Nations), as follows:

- 1. Food and non-alkoholic beverages*
- 2. Alcoholic beverages, cigarettes and narcotics*
- 3. Clothing and footwear*
- 4. Housing, water, electricity, gas and other fuels*
- 5. Furniture, household equipment and routine maintenance*
- 6. Health*
- 7. Transport*

- lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
 6. Kesehatan
 7. Angkutan
 8. Komunikasi
 9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
 10. Pendidikan
 11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
 12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- a. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
- b. Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung

8. *Communication*
9. *Recreation / entertainment and culture*
10. *Education*
11. *Provision eat drink and lodging / hotel*
12. *Goods and other services*

However, due to data limitations, the 12 COICOP is regrouped widened to 7 COICOP, namely:

1. *Food, Beverages and Tobacco*
2. *Clothing and Footwear*
3. *Housing, tools, and Household Routine*
4. *Health and Education*
5. *Transport, Communications, Recreation, and Culture*
6. *Hotel and Restaurant*
7. *Other*

Household consumption also includes the following things:

- a. *Imputed rental services of their own house (owner occupied dwellings);*
- b. *The estimated rental value of their own house must be taken into account because the household owner, considered to produce rental services home for himself.*

Imputed rent is estimated on the basis of market prices, although the status of one's own home. If households actually rented, then what counts is the cost of the rent paid, either paid in full or not full as it gets waivers (subsidy or transfer).

adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- c. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri.
- d. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain.
- e. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- a. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut).
- b. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- c. Pengeluaran rumah tangga yang dipakai untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang/jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- d. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

- c. *Goods produced and used on its own;*
- d. *Giving/reward in the form of goods received from another party;*
- e. *Goods and services purchased directly (direct purchase) by resident outside the region or abroad (treated as an import).*

There are some records that need to know about household consumption namely:

- a. *Direct purchases by non-residents, are treated as exports from the region).*
- b. *Purchases of goods which are not produced back (duplicated), such as antiques, paintings and other works of art are treated as investments on valuables, not domestic consumption.*
- c. *Household expenditure for the purposes of costs between capital formation in the household business activities, are not included in household consumption expenditure. For example, the purchase of goods and services for business purposes, a large home improvement, and home purchase.*
- d. *Expenditures for transfer purposes either in the form of money or goods, not included as household consumption expenditure.*

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- b. Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- c. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- d. Indeks Harga Konsumen (IHK).

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung underestimate (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (adjustment).

Dalam melakukan adjustment, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplay dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil adjustment, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan

Sources of data used to estimate PKRT are:

- a. National Socioeconomic Survey (Susenas) BPS, in the form of per-capita consumption expenditure for food a week, and per-capita spending a month for non-food group,*
- b. Total population at mid-year,*
- c. Secondary data (from BPS or from outside the BPS), in the form of data or indicators commodity supply and certain types of spending,*
- d. Consumer Price Index (CPI).*

Household consumption calculation based on Susenas. However, due to the estimation of household expenditure data derived from Susenas tend to underestimate (especially for groups of non-food and processed food), there should be an adjustment.

In doing adjustment, use of secondary data in the form of data or indicators supply from various sources of data outside of Susenas. Having obtained the results of adjustment, it is done is replace Susenas with the calculation results based on secondary data. Replacement is done at the level of the commodity, commodity groups, or certain types of spending. This is done because the result of the secondary data considered to better reflect the actual Household Consumption.

The above calculation steps to produce the amount of household consumption at current prices. household consumption at constant prices in 2010, obtained by deflating household consumption at current prices with the CPI base year of 2010.

(ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:

a. Makanan =

**pengeluaran konsumsi perkapita
seminggu x (30/7) x 12 x jumlah
penduduk pertengahan tahun**

b. Bukan makanan =

**pengeluaran konsumsi perkapita
sebulan x 12 x jumlah penduduk
pertengahan tahun**

2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (atau Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan

For more details, household consumption counting steps can be summarized as follows:

1. *Estimates household consumption Susenas:*

a. Food =

Expenditure per capita food consumption x week (30/7) x 12 x total population at mid-year

b. Not food =

consumption expenditure per capita a month x 12 x total population at mid-year

2. *Data points to 1 COICOP grouped into 7 groups, with some commodities that may be controlled separately;*
3. *The data at point 2 corrected by using secondary data or indicators commodity supply of certain types of spending;*
4. *Provided the value PKRT in 2010 that have been adjusted;*
5. *Arrange Implicit index based CPI City (or Province / City nearby);*
6. *PKRT 2010 at constant market price is obtained by dividing the result points to 4 with the result points to 5.*

2.2 Final Non-Profit Institutions Serving Household

Sector Non-Profit Institutions Serving Households appears as a separate sector in the economy area. This sector role in providing

dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- a. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat.
- b. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga.
- c. setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidakberhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga.
- d. kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus.
- e. istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

goods and services for its members and for households free or at prices that are not economically significant. Prices are economically meaningless meaning prices are usually below the market price (does not follow the prevailing market price).

Non-Profit Institutions Serving Households are part of non-profit institutions. In accordance with its function, LNP distinguished serving households LNP and LNP were serving not households.

Non-profit institutions unit characteristics are as follows:

- a. *non-profit institutions generally are formal institutions, but sometimes an informal institutions whose existence is recognized by the community.*
- b. *supervise the running of the organization carried out by elected members with the same rights, including the right to speak on the decision of the institution.*
- c. *each member has specific responsibilities within the organization, and is not entitled to retain the profit or surplus, due to the profit earned from productive activities controlled by the agency.*
- d. *policy institutions collectively decided by elected members, and the group serves as the executor of the Board.*
- e. *the term nonprofit does not mean that these institutions can not create surplus through productive activities, but the surplus obtained usually reinvested in similar activities.*

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha.

LNPRT dibedakan atas tujuh jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial; Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non-pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya.

Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

LNPRT is an institution that serves its members or household, and are not controlled by the government. Members of the institute is meant here is that not a form of business entity.

Non-Profit Institutions Serving Households distinguished seven types of institutions, namely: social organizations, social organizations, professional organizations, the Association of social/cultural/sports/hobbies, nongovernmental organizations, religious institutions, and organizations of humanitarian assistance/scholarships.

Non-Profit Institutions Serving Households expenditure value equal to the value of nonmarket output generated Non-Profit Institutions Serving Households. The output of non-market values are calculated based on the value of the entire expenditure LNPRT in order to carry out its operations.

Expenditure is made up of:

- a. Intermediate consumption, ie the purchase of stationery, printed materials, payment of electricity, water, telephone, telex, facsimile, the cost of meetings, seminars, banquets, transportation, fuel, travel, shopping goods and other services, rental of buildings, leasing office supplies etc.*
- b. Labor compensation, for example: wages, salaries, overtime, salaries, bonuses and other benefits.*
- c. Depreciation.*
- d. Other taxes on production (less subsidies)*

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi LNPRT adalah:

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil updating direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil updating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP.

Estimasi PK-LNPRT dengan menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

dimana

$\bar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, \dots, 19$

Sources of data used to estimate LNPRT are:

- Special Survey Results Non-profit Institutions (SKLNP). The information obtained from the SKLNP is the average expenditure by type of institution and type of expenditure.*

- Updating results Non-Profit Institutions Serving Households directory. The information obtained from the directory updating LNPRT is Non-Profit Institutions Serving Households population numbers by type of institution.*

- Consumer Price Index (CPI)*

Non-Profit Institutions Serving Households expenditure estimated using the direct method, which uses the results SKLNP.

Non-Profit Institutions Serving Households expenditure estimate by calculating the average expenditure by type of institution and type of expenditure (goods and services). Goods and services obtained free of charge, the value estimated in accordance prevailing market price. The average expenditure of the institution according to its kind is calculated by the following formula:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$: *Average expenditure by type of institution and type of expenditure*

x_{ij} : *Non-Profit Institutions Serving Households expenditure survey results by type of institution and type of expenditure*

n_i : *Number of samples Non-Profit Institutions Serving Households by type of institution*

i : *Type of LNPRT Institutions, $i = 1, \dots, 7$*

j : *Type of LNPRT Expenditure, $j = 1, \dots, 19$*

Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

dimana

$\bar{X}$: PK-LNPRT atas dasar harga berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang

Non-Profit Institutions Serving Households expenditure estimate, using the following formula:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

$\bar{X}$: *Non-Profit Institutions Serving Households expenditure at current market prices*

N_i : *Population Non-Profit Institutions Serving Households by type of institution*

The above calculation results will be obtained magnitude of Non-Profit Institutions Serving Households expenditure at current prices. Non-Profit Institutions Serving Households expenditure at 2010 constant market, obtained by deflate Non-Profit Institutions Serving Households expenditure current market prices with the CPI base year of 2010.

2.3 Government Final Consumption Expenditure

Government units are institutional units that formed through the political process, and has the power in the legislature, judiciary and executive over the units of other institutions that are within the boundaries of the territory of a country/region. The Government also has a variety of roles and other functions, such as providers of goods and services to a group or individual households, as collector and manager of tax or other revenue, serves to distribute income or welfare through transfer activity, as well as engage in non-market production.

In an economy, the government unit can act as consumers and producers, as well as regulators who set the policies in the areas of fiscal and monetary. For consumers, the

menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

- a. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb.
- Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan,

government will carry out activities on the consumption of final goods and services. Meanwhile, as the producer, the government will carry out the activity of producing goods and services and investment activities.

The value of government final consumption expenditure equal to the value of production of goods and services produced by government for government consumption itself. Government final consumption expenditure includes the purchase of goods and services that are routine, payment of wages and salaries, social transfers in kind, the estimated depreciation of capital goods, and the output value of Bank Indonesia, less the value of sales of goods and services produced production units that can not be separated from the activities of government.

Activity government production units that can not be separated from the activities of government in general, includes the following activities:

- a. *producing the same or similar goods with goods produced by the company. For example, the activity of printing of publications, postcards, reproductions of artwork, nursery plants in the experimental garden and so on. The activity of selling goods such incidental of the principal functions of government units.*
- b. *producing services. For example, the activity of the organization of hospitals, schools, universities, museums, libraries, recreation areas and the storage of art works financed by the government. In that kind activity,*

tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kota Banda Aceh mencakup :

- PK-Pemerintah Kota Banda Aceh.
- PK-Pemerintah Provinsi Aceh.
- PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kota Banda Aceh.
- PK-Pemerintah Desa/Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kota Banda Aceh tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan
(Dirjen Perbendaharaan Kanwil Aceh)
- Data realisasi APBD Tahunan
(Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dan Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh)
- Output Bank Indonesia (BI)

government is generally not allowed to charge more than the entire cost. Revenue received from this kind of activity is referred to as the acceptance of non-commodity (service revenues).

Government sector consists of the central government and local governments. In conducting its activities, the central government units will refer to the documents the State Budget (APBN), while the local government unit (either province, regency/municipality, or village) refers to the Government Budget (APBD).

Government final consumption expenditure Province include:

- Government final consumption expenditure of Banda Aceh Municipality.*
- Government final consumption expenditure of Aceh Province.*
- Government final consumption expenditure Central Government, which is part of the government of Banda Aceh Municipality.*
- Government final consumption expenditure Government of Village in Banda Aceh Municipality.*

Basic data used to calculate the Annual Provincial Government final consumption expenditure are:

- Data realization of the Annual Budget (DG Treasury Aceh)*
- Annual budget realization data (Provincial Finance Service of Provincial and Banda Aceh Municipality)*
- Output Bank Indonesia (BI)*
- Regional Finance Statistict from BPS*
- The Price Indices from BPS*

d. Survei Keuangan Kota (K2) dan Desa (K3) dari BPS

e. Indeks Harga dari BPS

Secara umum, PK-P atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\begin{aligned} &\text{PK-P atas dasar harga berlaku} \\ &= \\ &\text{Output non pasar – penjualan barang} \\ &\text{dan jasa + output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level PK-P Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kota Banda Aceh ditambah pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi Aceh ditambah pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/gampong yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh ditambah pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Kota Banda Aceh.

Pengeluaran konsumsi pemerintah konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

In general, Government final consumption expenditure at current market prices calculated using the following formula:

$$\begin{aligned} &\text{Government final consumption expenditure} \\ &\text{at current market prices} \\ &= \\ &\text{Output of non market - sales of goods and} \\ &\text{services + output of Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output of non-market is calculated with the approach amounts were spent, ie shopping procurement of goods / services, social assistance in the form of goods (purchased at market prices), personnel expenses, and depreciation.

For Banda Aceh Municipality level, Government final consumption expenditure is calculated based on the sum of final consumption expenditure Municipality government itself plus the final consumption expenditure of Aceh Province government, plus entire government expenditure villages in Banda Aceh region plus Central government expenditures that are part of the Municipality.

Constant government consumption expenditure was calculated using the method of deflation. Deflator used is the Wholesale Price Index (WPI) general without export, Wage Index, Index of Gross Domestic Product Implicit components of Gross Fixed Capital Formation, Consumer Price Index (CPI) general.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami

2.4 Gross Fixed Capital Formation (GFCF)

Investment activity is one of the main factors which will affect the economic development of a country/region. Investments here consists of physical investment and financial investment. In the context of GDP, physical investment activity is reflected in the components of Gross Fixed Capital Formation (GFCF) and inventory changes.

GFCF is closely related to the existence of fixed assets (fixed assets) are involved in the production process. Broadly speaking, the fixed assets can be classified according to the type of capital goods such as: building and construction, machinery and equipment, vehicles, plants, animals, and other capital goods.

GFCF is defined as the addition and subtraction of fixed assets on a unit of production, within a certain time. Addition of capital goods include procurement, manufacture, purchase, leasing (financial leasing) of new capital goods from domestic as well as new and used capital goods from abroad (including major repairs, transfer or barter capital goods), and the growth of biological resources assets cultivated. While the reduction in capital goods include the sale, transfer or barter, and leasing (financial leasing) used capital goods to the other party. Exceptions loss caused by natural disasters is not recorded as a reduction.

Capital goods have a life span of more than one year, and will experience shrinkage throughout its life span. The term "gross" indicates that it is still an element of depreciation.

penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan.

Penyusutan atau konsumsi barang modal menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari :

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin beserta perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya.
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan.
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- a. Output industri konstruksi hasil yang merupakan hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Kota Banda Aceh.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor

Depreciation or consumption of capital goods illustrates the decline in the value of capital goods used in the production process as normal during the period.

GFCF consists of:

- a. *Additions net of deductions of assets (property), both new and used goods items, such as residential buildings, non-residential buildings, other buildings, machinery and equipment, transport equipment, asset cultivated plants and animals (Cultivated assets), product intellectual property (intellectual property products), and so on.*
- b. *Costs over the ownership of non-financial assets that are not produced, such as land and patented assets.*
- c. *Major repairs of assets, aimed at increasing production capacity and remaining life (such as the production engine overhaul, reclamation, clearing, draining and irrigation forests, as well as prevention of flooding and erosion).*

Sources of data used to estimate household consumption are:

- a. *The output of the construction industry GDP calculation results according to the construction industry from BPS of Banda Aceh.*
- b. *2-digit HS import value, which is the capital goods imported from KPPBC (Office of Oversight and Customs Service) local.*

- Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level Provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level Provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing.

Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung.

Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas".

Dalam hal ini penyediaan atau "supply" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri

- c. *Industrial Production Index of Statistics Large Medium Small Industries & Household (provincial level).*
- d. *The company's financial statements.*
- e. *Statistics Publication of Large and Medium Provincial level.*
- e. *WPI of Statistics Wholesale Price.*
- g. *Statistics Publications Mining and Quarrying (oil and non-oil).*
- h. *Statistics publication Electricity, Gas and Water.*
- f. *Construction Statistics publication.*

GFCF calculation can be done through direct and indirect methods, depending on the availability of data that may be obtained in their respective territories.

"Directly" approach is by calculating the capital formation (fixed assets) are carried out by different economic sectors (manufacturers) directly.

While the approach of "indirect" is to calculate based on the allocation of the total supply of products (goods and services), which became the capital goods in various industries, or referred to as a "commodity flow".

In this case the provision or the "supply" of capital goods may come from domestic production (domestic) or from foreign products (imports).

GFCF calculation directly done by adding up all the value GFCF is happening in every industry (activities). Capital goods are valued on the basis of purchase price, includes all costs incurred, such as transportation costs, installation costs, taxes, and other costs

(lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan).

Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di "deflate" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

associated with the procurement of capital goods. For capital goods that are imported in it, including customs duties and taxes associated with the procurement or transfer ownership of such capital goods.

Basically the data for calculating GFCF directly can be obtained from the company's financial statements. The data provided include information/data on changes in fixed assets (GFCF) were assessed at constant bprice force or the purchase price (acquisition).

To obtain the value of GFCF at constant price, the GFCF of the at current market prices is "deflate" (divided) by the wholesale price accordance with the capital goods.

Calculation of GFCF in an indirect way, referred to as the commodity flow approach.

This approach is done by calculating the value of the supply of goods produced by various industries, which later became part of which was allocated for capital goods. Calculation of GFCF in the form of the building, carried out using a specific ratio of the value of output of the construction industry, both at current market prices or at constant market prices.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut harus ditambah biaya angkut dan margin perdagangan hingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Nilai PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dari men-deflate PMTB (atas dasar harga berlaku) dengan IHPB sesuai jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di-reflate (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor.

Calculation of GFCF in the form of machinery, transport equipment and other capital goods are distinguished on capital goods originating from domestic production and from imports. For domestic capital goods, can be obtained in two ways. First, by allocating output of machinery, transport equipment and other capital goods into capital formation. This value is still to be added to the cost of transport and trading margin, in order to obtain GFCF at current price. To obtain the value at constant price is deflating GFCF (at current market prices) with WPI in accordance with the type of capital goods.

The second approach, which should be done when the data output is not available is by way of "extrapolation" or multiplying the GFCF at constant price with the production index corresponding types of capital goods. For beginning, the step is calculating the GFCF at constant price first. Furthermore, to obtain GFCF at current price, value of CFCF at constant price is reflated (multiplied) by the index price of each corresponding type of capital goods (as inflator). This requires that the GFCF at constant market prices in previous years has been provided in full.

Calculation of GFCF in the form of machinery, transport equipment and other capital goods that are imported, done using two (2) ways.

First, GFCF at current price is obtained from the total value of imported goods. Furthermore, the capital goods broken down by major groups such as machinery, transport equipment and other capital goods. If items is

Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Ke dua, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara men"deflate" PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan men-deflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software.

Untuk atas dasar harga konstan diperoleh dengan mendeflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original, data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film

not available can be used as an allocator certain ratio (capital goods imported 2-digit HS code). To two, to obtain PMTB at constant price is deflating GFCF at current price with an appropriate price index.

GFCF at current market prices for nontangible capital goods such as mineral exploration, calculated by collecting data public company financial statements in the mining industry. By using panel data, the growth at current price from mining activities it becomes a multiplier value of mineral exploration in the previous period. While his PMTB constant market prices obtained by deflating it's current price value with implicit indices mining industry.

For software, GFCF at current price obtained by collecting data open the company's financial statements in the field of software.

For constant prices value obtained by deflating it currnet value with the implicit index of service industry companies.

Calculation of GFCF works of entertainment, literature, and original art, the data collected is the value of soap operas and television programs that can be made. While the film Import Data obtained from the value of imported films. GFCF at constant price obtained by deflating it's current price value with implicit index to entertainment services industry and the wholesale price index of imported goods.

diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tidak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (Trade and Transport Margin) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 Perubahan Inventori

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah.

Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu

There are some problems that occur in the calculation of GFCF through an indirect approach (commodity flow), namely:

- a. The ratio of use of the industrial output of capital goods tend to be static. To fix the necessary large-scale surveys.*
- b. The value of trade and transport margins (Trade and Transport Margins) are difficult to obtain.*
- c. Hose (lag) between the data in the measurement period (reference) with the publication of data obtained from a particular data source, too long.*

2.5 Changes of Inventories

In economic activity, inventory serves as one of the components required for the continuity of the production process, in addition to labor and capital goods.

In GRDP, component inventory changes are part of the Gross Capital Formation, or better known as the physical investment that occurs at a certain time in a region.

Changes in inventories describing part of the investment that is realized in the form of finished goods, intermediate goods, and raw materials and auxiliary materials in a given period. Availability of data changes in inventories become essential to meet the needs of analysis of

periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk kebutuhan analisis aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi.

Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu adanya pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong.

Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

investment activity.

A simple understanding of the inventory (inventory) is controlled by the manufacturer of goods for the purpose of further processing (intermediate consumption) into the goods in another form, which has economic value and the value of higher benefits. Including in this sense is the goods that are still in the process (work in progress), as well as finished goods have not been marketed and is still controlled by the manufacturer.

Changes in inventories is the difference between the value of inventory at the end of the accounting period to the value of inventory at the beginning of the accounting period.

Changes in inventories explain the change in position of goods inventory, which can significantly increase (a positive sign) or subtraction (negative sign).

For manufacturers, the existence of inventory needed to maintain the continuity of the production process, so it needs a good backup in the form of raw materials or auxiliary materials.

Uncertainty caused by external influences also be a consideration factor for entrepreneurs to do a backup (especially raw materials). For traders, inventory procurement influenced more by speculative elements in the hope to obtain greater profits.

Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (material & supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
- f. Ternak untuk tujuan dipotong.
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk

As for the government, especially the provisioning policy of strategic commodities is primarily intended to maintain economic stability, political and social. Because of the public interest (public), then there needs to be a backup for some basic food items such as rice, flour, cooking oil and sugar. For household inventory procurement is intended to ease in managing their consumption behavior alone.

Inventory can be classified according to the type of goods are as follows:

- a. Inventories by industry, such as product or plantation crops, forestry, fisheries, mining, processing industry, city gas, water, and construction.*
- b. Various types of raw and auxiliary materials (materials and supplies), ie all materials, parts or supplies for further processing into finished goods.*
- c. Finished goods, ie goods that have been processed but not yet sold or not yet used, including the goods sold in the same form as at the time of purchase.*
- d. Semi-finished goods, ie goods that have been partially processed or unfinished (not including unfinished construction).*
- e. Merchandise which is still controlled by the wholesaler or retailer for the purpose of sale.*
- f. Livestock for the purpose of cut.*
- g. Procurement of goods by the trader for the purpose of sale or used as fuel or supplies.*

tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.

- h. Persediaan pada pemerintah, mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD.
- b. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- c. Data komoditas perkebunan.
- d. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih.
- e. Indeks harga perdagangan besar (IHPB)
- f. Data eksternal lain

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan.

- h. *Stock up on government, which includes strategic goods such as rice, soybeans, sugar, and wheat.*

Source of data used for calculating the components of changes in inventories is:

- a. *Financial Statements of the Company SOE/enterprises.*
- b. *Inventory Data Publications Annual Industry Large Medium.*
- c. *Data commodities.*
- d. *GRDP implicit price index of selected industries.*
- e. *Wholesale price index (WPI)*
- h. *Other external data,*

There are two methods used in calculating the components of the change in inventories, which is a direct approach and the indirect approach. The direct approach is the approach of the "corporation", whereas the indirect approach is the approach of the "commodity".

In view of the benefits, the approach of directly generating data is relatively better than the indirect approach. Commodity approach can only be performed if the data available inventory position in detail and continuously.

By using a direct approach, will obtain the value of the inventory position at a certain time (usually at the end of the year). The main data source is the year-end balance sheet account of the company.

Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan adalah sbb:

- a. menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara men-deflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun.
- b. menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan cara mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya.
- c. menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku berlaku dengan meng-inflate perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga tiap barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia.

Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan:

- a. men-deflate nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai
- b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

To obtain the value of inventory change at current price, required inventory data in successive years. Step counting inventory of the financial statements is as follows:

- a. calculate the inventory position in constant market prices, by deflating start and end of stock with end year of WPI.*
- b. calculate changes in inventories at constant price by subtracting the position in the current year with the previous year.*
- c. calculating changes in inventories at current price by inflating changes in inventories at constant price with an average annual WPI.*

Indirect approach is also called the commodity flow. Key data used is the data volume and the price of each item inventory. Value changes in inventories of goods at current price obtained by calculating the change in the volume of stock final and initial stock multiplied by the average purchase price, or the price of the sale when the purchase price data are not available.

Changes of inventory goods by constant market price is calculated by:

- a. value deflate of inventory change at current market price with an appropriate price index*
- b. multiplying the volume change of the stock final and initial stock multiplied by the price of goods in the base year.*

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan.
- b. Tidak semua komoditas inventori dapat tersedia data volume dan harganya.
- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai.
- d. Diperlukan adjustment dengan cara memark-up, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 Ekspor Impor

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas

The limitations and problems encountered in component count Inventory changes are:

- a. Inventory data that is needed is in the form of a position or at a time for a period of time sequence.*
- b. Not all commodities inventory data available volume and price.*
- c. Data changes in inventories available in the form of a data volume is generally not accompanied by a price. If the inventory price data is not available, then it can be assumed commodity price index GDP implicit inventory following the appropriate index.*
- d. Required adjustment with how to mark-up, in order to complete the estimate for the industry for which data are not available.*

2.6 Export Import

Import-export activities in a region believed to have occurred long ago, even before the area was zoned for government. Variety of goods and services produced and the price disparity, a major factor in the emergence of an import-export activities. Areas that can not meet their own needs trying to bring in from other regions or even other countries. On the other hand, areas that produce goods and services in excess of domestic demand, encouraged to expand markets outside the region or even abroad.

Along with the times, the activity of production and consumer demand for goods and services is increasing and diverse. Progress in the

barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah/hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Import suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut.
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut; jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei serta masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

field of transport and communication also facilitate the flow of goods and services. The conditions further boost export-import activity in a region becoming increasingly developing.

Export-import in an area defined as the transfer of economic ownership (both sale / purchase, barter, gifts or grants) on goods and services between the resident of the region with nonresidents who are outside the region.

Export-Import in a region consisting of:

- a. *Export/import of goods from/to Overseas to/from the province.*
- b. *Export/import services from/to Overseas to/from the province. Scope of services include transport services, insurance, communication, tourism, and other services*
- c. *Net exports between regions*
 - *Exports between regions*
 - *Import of inter-regional*

Sources of data used to estimate PKRT are traffic information goods in and out of the province of the results of the survey.

Besides, the value of exports and imports are still plus/minus the value of direct purchases and transactions, which undocumented transaction by both resident and non-resident. While net exports between regions is a residual value (residual) between the undertaking of GRDP by expenditure GRDP.

BAB 3 TINJAUAN EKONOMI

Chapter 3 Economic Review

Perekonomian Kota Banda Aceh sebagai kesatuan ekonomi yang menyeluruh dapat digambarkan dengan PDRB. Meningkatnya nilai PDRB menunjukkan peningkatan kinerja perekonomian, begitu pula sebaliknya. Perekonomian Kota Banda Aceh terus meningkat dilihat dari nilai PDRB ADHB selama lima tahun terakhir.

PDRB Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp 845,57 milyar per tahun selama kurun waktu 2012-2016. Pada tahun 2016 PDRB meningkat sebesar Rp 1,3 triliun dari Rp 14,48 triliun pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan adanya pelaksanaan proyek konstruksi tahun jamak (multiyears) dengan nilai kontrak besar.

The economy of Banda Aceh city as economic unity that can with PDRB. Increased PDRB shows performance, and vice versa. The economy of Banda Aceh City has steadily increased from ADHB GRDP over the last five years.

GRDP of Kota Banda Aceh at current prices is Rp 845.57 billion per year for the period 2012-2016. In 2016 GRDP increased by Rp 1.3 trillion from Rp 14.48 trillion in 2015. This increase was due to multiyear multi-year contracts with large contract value.

Tabel 3.1. 3 Besar Kabupaten/Kota Penyumbang Terbesar PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Aceh (trilyun rupiah), 2012-2016
Big 3 Regency/City Contributor to GRDP in Current Price in Aceh Province (billion rupiahs), 2012-2016

2012	2013	2014	2015*	2016**
1. Kab. Aceh Utara 19,746	1. Kab. Aceh Utara 20,080	1. Kab. Aceh Utara 19,940	1. Kab. Aceh Utara 16,332	1. Kab. Aceh Utara 16,731
2. Kota Banda Aceh 11,573	2. Kota Banda Aceh 12,568	2. Kota Banda Aceh 13,501	2. Kota Banda Aceh 14,486	2. Kota Banda Aceh 15,801
3. Kota Lhokseumawe 9,321	3. Kota Lhokseumawe 9,578	3. Kab. Aceh Besar 9,649	3. Kab. Aceh Besar 10,321	3. Kab. Aceh Besar 10,960
.....				
Provinsi Aceh 114,552	Provinsi Aceh 121,331	Provinsi Aceh 127,897	Provinsi Aceh 128,980	Provinsi Aceh 137,277
Indonesia 8.615,704	Indonesia 9.546,134	Indonesia 10.569,705	Indonesia 11.531,716	Indonesia 12.406,809

PDRB Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku tahun 2016 sebesar Rp 15,80 triliun rupiah menjadikan Kota Banda Aceh sebagai penyumbang kedua terbesar PDRB Provinsi Aceh setelah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan kabupaten penghasil migas terbesar di provinsi ini. Meski demikian, dengan telah selesainya periode eksploitasi migas di Kabupaten Aceh Utara, Kota Banda Aceh berpeluang menjadi penyumbang PDRB terbesar Provinsi Aceh di masa depan.

Pada tahun 2016, pembangunan proyek konstruksi besar di Kota Banda Aceh dapat dikatakan mencapai puncaknya. Proyek perluasan Mesjid Raya Baiturrahman memasuki bagian akhir dengan selesainya pemasangan payung elektrik raksasa. Demikian halnya dengan perluasan Jembatan Lamnyong yang selesai di akhir tahun. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto menjadi salah satu kontributor terbesar PDRB 40,70 persen.

Banda Aceh GRDP at current prices in 2016 amounted to Rp 15.80 trillion rupiah make the city of Banda Aceh as the second largest contributor to the GDP of Aceh province after the North Aceh district which is the largest oil and gas producing districts in the province. However, with the completion of the period of oil and gas exploitation in the district, North Aceh, Banda Aceh likely to be the largest contributor to the GDP of Aceh province in the future.

In 2016, the construction of a major construction project in Banda Aceh City can be said to reach its peak. The Baiturrahman Great Mosque extension project enters the end with the completion of a giant electric umbrella installment. This is the case with the expansion of the Lamnyong Bridge completed at the end of the year. The Gross Fixed Capital Formation component becomes one of the biggest contributors to GDP of 40.70 percent.

Tabel 3.2. Distribusi PDRB Kota Banda Aceh ADHB Menurut Pengeluaran, 2012-2016
Table Component Share of Banda Aceh GRDP by Expenditure in Current Price, 2012-2016

Komponen Component	PDRB (juta rupiah) GRDP (million rupiahs)	Distribusi PDRB (persen) GRDP Share (percent)
(1)	(2)	(3)
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption</i>	9 349 119,67	59,16
B. Pengeluaran Konsumsi LNPR <i>Private Non-Profit Institutions Expenditure</i>	209 342,22	1,32
C. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Expenditure</i>	7 631 068,11	48,29
D. Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	6 430 967,93	40,70
E. Perubahan Inventori <i>Changes in Inventory</i>	1 228,41	0,01
F. Net Ekspor (Ekspor-Impor) <i>Net on Export-Import of Goods/Services</i>	- 7 819 935,06	-49,49
PDRB GRDP	15 801 791,28	100,00

Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Walikota Provinsi Aceh di tahun 2017 menyebabkan semaraknya kampanye pada tahun sebelumnya yakni di tahun 2016. Pengeluaran partai politik yang meningkat tersebut menyebabkan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sedikit meningkat kontribusinya menjadi 1,32 dari tahun sebelumnya 1,27 persen. Kenaikan kontribusi juga dialami komponen Perubahan Inventori dimana menjadi positif 0,01 persen setelah tahun sebelumnya negatif 0,05 persen serta Net Ekspor dimana meningkat dari negatif 51,96 persen menjadi negatif 49,49 persen.

Di lain pihak, pengeluaran pemerintah selain belanja modal juga mengalami pengetatan anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Kombinasi hal tersebut dan rendahnya serapan anggaran menyebabkan kontribusi komponen pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan PDRB hanya sebesar 48,29 persen. Kontribusi ini sangat menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 60-an persen dimana tahun 2015 sebesar 61,42 persen.

Penurunan kontribusi juga dialami komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang turun menjadi 59,16 persen dari tahun sebelumnya 60,21 persen.

The election of the Provincial Head (Election) of the Governor and the Mayor of the Province of Aceh in 2017 led to the splendor of the campaign in the previous year ie in 2016. Increased political party expenditure caused the LNPRT Consumption Expenditure component to slightly increase its contribution to 1.32 from the previous year 1.27 percent. The increase in contribution was also experienced by the Inventory Change component which became positive 0.01 percent after the previous year negative 0.05 percent and Net Export which increased from negative 51.96 percent to negative 49.49 percent.

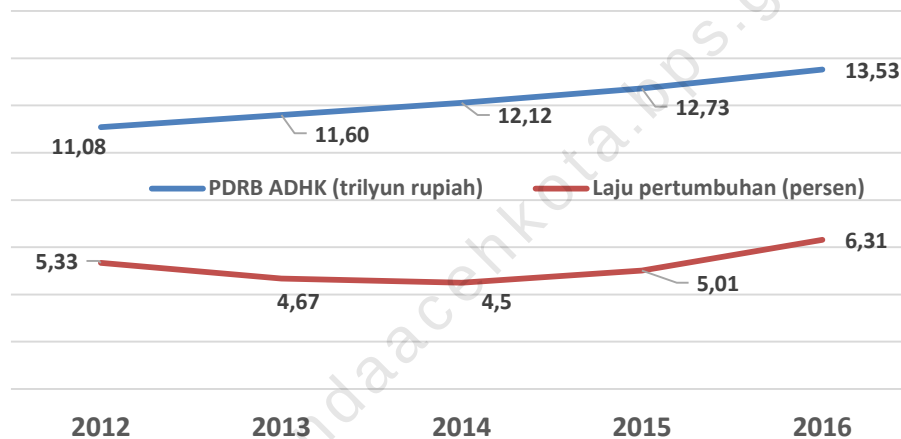
On the other hand, government expenditures in addition to capital expenditures also experienced budget tightening as in previous years. The combination of these and the low absorption of budget causes the contribution of government expenditure component to the formation of GRDP only 48.29 percent. This contribution is very declining from previous years which reached 60s percent where the year 2015 of 61.42 percent.

The decline in contribution was also experienced by Household Consumption Expenditures that fell to 59.16 percent from a year earlier of 60.21 percent.

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga sehingga dapat memberikan pengertian yang salah akan perkembangan perekonomian. Untuk itu agar dapat melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2016 telah mencapai sebesar Rp 13,53 triliun, naik sebesar 803,13 milyar dari tahun 2015.

In a change in the value of GDP at current prices still there is the influence of price changes so as to give a wrong understanding of the development of the economy. For it to be able to see the real development GRDP then used the GDP at constant prices (ADHK) with a base year of 2010. The GRDP value ADHK Banda Aceh in 2016 has reached Rp 13.53 trillion, an increase of 803.13 billion from 2015.

Gambar 3.1. PDRB ADHK Kota Banda Aceh dan Laju Pertumbuhannya, 2012-2016
Figure GRDP of Banda Aceh in Constant Market Price and It Growth, 2012-2016



Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan standar materi kehidupan masyarakat yang secara makro yang dapat diukur dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi, diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perbaikan teknologi, mendorong terjadinya perubahan pendapatan.

Economic growth can be interpreted as an increase in the standard of living material that macro community that can be measured from the value of GDP at constant prices. Increasing the number of goods and services produced, followed by increasing population and technological improvements, led to changes in income.

Kondisi ekonomi Kota Banda Aceh dilihat dari pertumbuhan ekonominya masih terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2012-2016 menunjukkan gejala penurunan di

The economic condition of Kota Banda Aceh is seen from its economic growth is still increasing from time to time. Economic growth during the period 2012-2016 shows symptoms of decline in the middle of the period and rebound

tengah periode dan kembali naik di akhir periode. Pada tahun 2016 sendiri, laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mencapai 6,31 persen yang menunjukkan akselerasi lebih baik dari tahun 5 yang sebesar 5,01 persen.

at the end of the period. In 2016 alone, the economic growth rate of Banda Aceh City reaches 6.31 percent, which shows better acceleration from year 5 which amounted to 5.01 percent.

Tabel
Table

3.3. Laju Pertumbuhan Komponen dan Kontribusi atas Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Banda Menurut Pengeluaran, 2016

Component's Growth and Their Contribution to GRDP Growth of Banda Aceh in Constant Price, 2016

Komponen <i>Component</i>	Laju Pertumbuhan (persen) <i>Growth (percent)</i>	Kontribusi atas Pertumbuhan (poin) <i>Contribution on GRDP Growth (poin)</i>
(1)	(2)	(3)
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption</i>	4,27	2,23
B. Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>Private Non-Profit Institutions Expenditure</i>	9,42	0,12
C. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Expenditure</i>	-9,99	-5,03
D. Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	42,20	10,60
E. Perubahan Inventori <i>Changes in Inventory</i>	-114,97	0,05
F. Net Ekspor (Ekspor-Impor) <i>Net on Export-Import of Goods/Services</i>	11,32	-1,61
PDRB GRDP	6,31	6,31

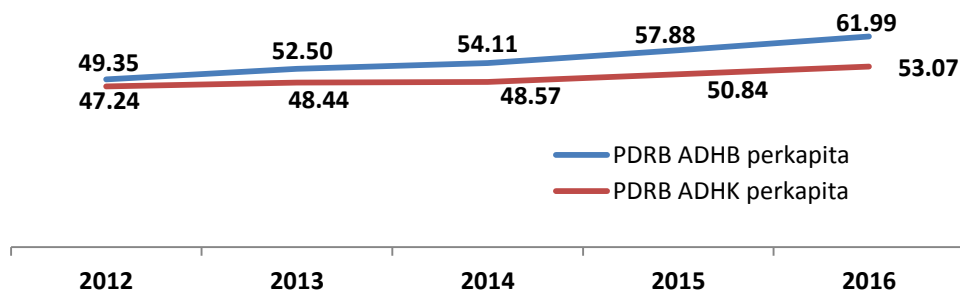
Angka PDRB mencerminkan produktivitas secara umum, tanpa mempertimbangkan pembagiannya terhadap masing-masing penduduk. Dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, akan diketahui tingkat produktivitas perkapita (PDRB perkapita).

PDRB perkapita sering digunakan sebagai indikator awal ukuran kesejahteraan penduduk suatu daerah dan perbandingan kesejahteraan antar daerah. Untuk membandingkan antar daerah, digunakan PDRB ADHB perkapita. Adapun bila akan membandingkan antarwaktu, lebih tepat digunakan PDRB ADHK perkapita.

Figures PDRB reflect productivity in general, regardless of division to each resident. By dividing the GDP by the total population, will determine the level of productivity per capita (GDP per capita).

The GDP per capita is often used as an early indicator for measuring the welfare of the population. To compare the prosperity between the regions, which is often used is the GDP per capita in current price, while comparing the intertemporal, GDP per capita in constant price more appropriate.

Gambar 3.2. PDRB Perkapita Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan/ADHK (juta rupiah), 2012-2016
GRDP Percapita of Banda Aceh at Current and Constant Price (million rupiahs), 2012-2016



PDRB per kapita Kota Banda Aceh ADHK tercatat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga konstan sudah mencapai 53,07 juta rupiah bila dibandingkan pencapaian 47,24 juta rupiah di tahun 2012. Kenaikan 5,83 juta rupiah selama periode 5 tahun tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan rata-rata 1,16 juta rupiah PDRB perkapita setiap tahunnya.

PDRB per kapita Kota Banda Aceh sebesar 61,99 juta rupiah di tahun 2016 jauh di atas rata-rata Provinsi Aceh sebesar 26,93 juta rupiah. Pun bila dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di provinsi ini. Yang terdekat, PDRB per kapita Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Nagan Raya masing-masing baru mencapai 39,60 juta rupiah dan 39,07 juta rupiah.

GRDP per capita of Kota Banda Aceh on constant price is increasing from year to year. In 2016, the PDRB per capita of Banda Aceh at constant prices has reached 53.07 million rupiah compared to the achievement of 47.24 million rupiah in 2012. The increase of 5.83 million rupiah over the 5 year period shows that there has been an increase in the average 1.16 million rupiah per year PDRB per capita.

GRDP per capita of Banda Aceh amounted to 61.99 million rupiah in the year 2016 well above the average of Aceh Province of 26.93 million rupiah. Even when compared with other cities / districts in the province. The nearest, GRDP Per capita of Lhokseumawe City and Regency of Nagan Raya each only reached 39.60 million rupiah and 39.07 million rupiah.

PDRB

LAMPIRAN

<http://bandacehkras.go.id>

Tabel
Table

L.1. PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran, 2012-2016
GRDP of Banda Aceh at Current Market Prices By Expenditure (million), 2012-2016

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6 616 270,07	7 343 294,78	8 104 820,46	8 722 777,79	9 349 119,67
a. Makanan, Minuman & Rokok	2 096 482,87	2 293 219,70	2 526 717,80	2 718 411,97	2 998 074,92
b. Pakaian & Alas Kaki	299 939,67	337 363,99	367 363,99	393 132,79	429 247,15
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga/	1 083 801,33	1 231 906,01	1 394 906,01	1 571 319,41	1 705 349,17
d. Kesehatan & Pendidikan	469 315,46	515 809,95	562 272,11	613 773,31	658 997,31
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	1 960 475,23	2 175 829,69	2 361 663,60	2 463 231,89	2 481 084,87
f. Hotel & Restoran	350 437,26	383 261,02	425 828,48	450 458,33	502 139,79
g. Lainnya	355 818,24	405 904,41	466 068,47	512 450,10	574 226,47
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	123 270,60	141 955,60	189 167,83	184 438,63	209 342,22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6 829 555,58	8 199 481,86	8 455 279,29	8 897 727,67	7 631 068,11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3 007 278,53	3 273 836,21	3 441 115,04	4 216 016,89	6 430 967,93
a. Bangunan/	2 607 038,69	2 838 372,18	2 965 693,56	3 591 872,29	5 733 738,42
b. Non-Bangunan	400 239,83	435 464,03	475 421,48	624 144,60	697 229,51
5. Perubahan Inventori	432 950,67	5 981,39	-33,04	-7 365,09	1 228,41
6. Ekspor	4 395 472,87	5 029 132,30	5 483 067,68	5 791 925,01	5 871 908,81
7. Dikurangi Impor	9 830 871,50	11 425 678,12	12 171 814,33	13 318 706,42	13 691 843,87
P D R B	11 573 926,82	12 568 004,01	13 501 602,92	14 486 814,49	15 801 791,28

* Angka Sementara/Preliminary Figure

** Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figure

Tabel L 2 PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran, 2012-2016
Table GRDP of Banda Aceh at Constant Market Prices By Expenditure (million), 2012-2016

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 928 807,46	6 157 997,63	6 405 428,40	6 655 770,07	6 939 923,85
a Makanan, Minuman & Rokok	1 836 296,16	1 890 999,32	1 951 213,03	2 023 469,74	2 110 219,78
b Pakaian & Alas Kaki	256 633,53	266 240,74	274 410,54	282 831,03	294 532,32
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga/	942 148,60	984 220,02	1 019 772,90	1 081 311,73	1 155 513,46
d Kesehatan & Pendidikan	430 280,81	452 750,05	478 002,40	504 665,14	521 872,95
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	1 809 524,26	1 878 284,89	1 966 930,60	2 017 418,22	2 060 152,59
f Hotel & Restoran	311 407,81	319 728,06	329 378,10	339 319,39	365 319,00
g Lainnya	342 516,28	365 774,54	385 720,83	406 754,82	432 313,75
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	122 164,79	133 765,84	166 765,90	158 644,37	173 594,70
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5 733 047,66	6 004 800,59	6 288 716,99	6 402 287,40	5 762 476,15
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 664 985,67	2 662 860,10	2 654 337,62	3 195 611,99	4 544 235,38
a Bangunan/	2 296 725,52	2 283 694,82	2 274 824,04	2 705 818,85	4.043.496,98
b Non-Bangunan	368 260,16	379 165,28	379 513,57	489 793,14	500.738,40
5 Perubahan Inventori	350 955,19	5 221,42	(26,05)	(5 740,55)	859,10
6 Ekspor	4 256 831,60	4 676 628,75	5 147 691,11	5 535 392,65	5 682 513,50
7 Dikurangi Impor	7 977 112,22	8 044 045,85	8 544 386,62	9 216 805,85	9 575 307,89
P D R B	11 079 680,15	11 597 228,47	12 118 527,34	12 725 160,07	13 528 294,78

* Angka Sementara/Preliminary Figure

** Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figure

Tabel
Table

L 3

Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran, 2012-2016*Distribution of Banda Aceh's GRDP at Current Market Prices By Expenditure (million), 2012-2016*

Komponen		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57,17	58,43	60,03	60,21	59,16
a	Makanan, Minuman & Rokok	18,11	18,25	18,71	18,76	18,97
b	Pakaian & Alas Kaki	2,59	2,68	2,72	2,71	2,72
c	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga/	9,36	9,80	10,33	10,85	10,79
d	Kesehatan & Pendidikan	4,05	4,10	4,16	4,24	4,17
e	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	16,94	17,31	17,49	17,00	15,70
f	Hotel & Restoran	3,03	3,05	3,15	3,11	3,18
g	Lainnya	3,07	3,23	3,45	3,54	3,63
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,07	1,13	1,40	1,27	1,32
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	59,01	65,24	62,62	61,42	48,29
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,98	26,05	25,49	29,10	40,70
a	Bangunan/	22,53	22,58	21,97	24,79	36,29
b	Non-Bangunan	3,46	3,46	3,52	4,31	4,41
5	Perubahan Inventori	3,74	0,05	(0,00)	(0,05)	0,01
6	Ekspor	37,98	40,02	40,61	39,98	37,16
7	Dikurangi Impor	84,94	90,91	90,15	91,94	86,65
P D R B		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara/Preliminary Figure

** Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figure

Tabel
Table

L 4 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran, 2012-2016

Growth of Banda Aceh's GRDP at Constant Market Prices By Expenditure (million), 2012-2016

Komponen		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,64	3,87	4,02	3,91	4,27
a	Makanan, Minuman & Rokok	3,26	2,98	3,18	3,70	4,29
b	Pakaian & Alas Kaki	4,07	3,74	3,07	3,07	4,14
c	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga/	3,54	4,47	3,61	6,03	6,86
d	Kesehatan & Pendidikan	5,45	5,22	5,58	5,58	3,41
e	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	2,61	3,80	4,72	2,57	2,12
f	Hotel & Restoran	1,15	2,67	3,02	3,02	7,66
g	Lainnya	11,78	6,79	5,45	5,45	6,28
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,99	9,50	24,67	(4,87)	9,42
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,76	4,74	4,73	1,81	(9,99)
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,16	-0,08	(0,32)	20,39	42,20
a	Bangunan/	-0,94	-0,57	(0,39)	18,95	49,44
b	Non-Bangunan	7,64	2,96	0,09	29,06	2,23
5	Perubahan Inventori	764,94	-98,51	(100,50)	21.933,33	(114,97)
6	Ekspor	4,33	9,86	10,07	7,53	2,66
7	Dikurangi Impor	7,51	0,84	6,22	7,87	3,89
P D R B		5,33	4,67	4,50	5,01	6,31

* Angka Sementara/Preliminary Figure

** Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figure

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDA ACEH

Jl. Laksamana Malahayati km 6,5

Desa Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh

Telp/Fax : (0651) 8012501, Email : bps1171@bps.go.id

Website : bandaacehkota.bps.go.id